

SEKITAR KRISIS NUKLIR IRAN

Oleh:

DR. Yanyan Mochamad Yani, Drs., M.A.

Di awal tahun 2007 ini babak baru persetujuan antara Amerika Serikat (AS) dengan Iran telah dimulai. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dimotori AS secara aklamasi mulai menerapkan sanksi bagi Iran yang berisi larangan perdagangan material nuklir. Sanksi tersebut diambil setelah Iran menolak untuk menghentikan program pengayaan uranium yang dicurigai Barat, khususnya AS, untuk mengembangkan persenjataan nuklir.

Menanggapi sanksi Dewan Keamanan PBB tersebut, Pemerintah Iran kembali menyatakan bahwa program nuklirnya hanyalah untuk kepentingan sipil. Lebih lanjut, Iran kembali mengulangi ancamannya akan menggunakan senjata apapun untuk mempertahankan diri, termasuk ekspor minyak, sebagai senjata dalam menghadapi tekanan internasional terhadap program nuklir Iran. Sudah barang tentu apabila ancaman ini benar-benar dipraktekkan Iran, maka tak dapat lagi harga minyak mentah di pasaran dunia akan meningkat dan berbagai transaksi perdagangan internasional akan ikut juga terganggu.

Di lain pihak AS tampaknya tak gentar dengan ancaman Iran tersebut. Menteri Pertahanan AS Robert Gates beberapa waktu lalu menyatakan bahwa kehadiran Angkatan Laut AS di Teluk Persia akan ditingkatkan. Gates secara eksplisit menyatakan bahwa jumlah tentara AS di Irak saja diperkirakan akan bertambah mendekati sekitar 140.000 personel. Menurut AS, peningkatan militer tersebut merupakan bagian dari strategi global perang melawan terorisme dalam jangka waktu yang lama dan merupakan pesan pada kawasan, khususnya bagi Iran dan Suriah, bahwa cengkeraman militer AS akan makin kuat di kawasan Timur Tengah, khususnya Teluk Persia.

Retorika pemerintah AS di atas bukanlah hal yang baru. Kita mafhum bahwa setiap langkah yang bersifat politis dan militer negara *super power* selalu tidak lepas dari strategi globalnya. Namun pertanyaannya kini adalah, benarkah pengeluaran peningkatan kekuatan militer AS di Teluk Parsi hanya semata-mata disebabkan oleh adanya penolakan Iran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB?. Ada apa sebenarnya dibalik reaksi kebijakan AS di atas?. Tulisan ini mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan membatasi diri dari sudut pandang arti strategis kawasan Timur Tengah, khususnya Iran, bagi negara-negara besar terutama AS.

Kalkulasi Strategi

Timur Tengah mempunyai arti strategis yang sangat besar. Pertama, berkat letaknya pada titik pertemuan tiga benua (Afrika, Asia, dan Eropa), Timur Tengah menguasai lalu lintas darat, laut, dan udara antara Eropa, Asia, dan Eropa. Kedua, di kawasan itu terdapat beberapa jalur pelayaran penting yaitu Selat Bosphorus, Selat Dardanella, Terusan Suez, Selat Bab El Mandeb, dan Selat Hormuz. Ketiga, kawasan ini mengandung sumber utama minyak, bahan bakar utama dan bahan mentah yang paling diperlukan dalam peradaban industri kontemporer. Cadangan minyaknya hampir sekitar dua pertiga cadangan minyak dunia dan produksinya pernah mencapai 40 persen produksi dunia.

AS ikut melibatkan diri dalam percaturan kawasan Timur Tengah, pada dasarnya merupakan manifestasi tekad membendung perluasan daerah pengaruh (*sphere of influence*) dan daerah kepentingan (*sphere of interest*) dari negara-negara lain yang berseberangan dengan kepentingan nasional AS. Hal itu disebabkan ketergantungan Barat akan impor minyak dari kawasan itu sangat besar, misalnya saja 2/3 minyak Jepang, 3/5 minyak Eropa dan 1/7 minyak Amerika Serikat berasal dari Teluk Parsi. Maka itu, tak dapat dipungkiri bahwa krisis kepemilikan nuklir Iran tampaknya mempermudah AS mencapai Teluk Parsi dan suplai utama minyak Barat.

Pijakan lainnya dari pemerintahan Bush untuk memperhitungkan potensi Iran di Teluk Parsi dikuatkan beberapa alasan. Pertama, AS telah memusatkan kekuatan militer kurang lebih 140.000 personel dengan dukungan dua kapal induk beserta kapal-kapal perang kawalannya di negara tetangga Iran sejak invasinya ke Irak Maret 2003. Kedua, AS dengan bantuan pasukan NATO berhasil menduduki Afghanistan sehingga juga dapat menyerbu Iran dari negara itu.

Ketiga, sejak tampilnya Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad ke tampuk kekuasaan di Iran, muncul corak baru peningkatan-peningkatan kekuatan progresif, khususnya gerakan-gerakan untuk melawan imperialisme Amerika Serikat di berbagai belahan dunia. Dewasa ini pimpinan tertinggi Shia di Iran dapat dianggap sebagai Imam dan pelindung bukan saja dari seluruh umat Shia tetapi juga dari kelas-kelas tertindas, seperti umat Islam yang sedang berjuang di berbagai belahan dunia. Kategori kaum tertindas itu belakangan ini juga diperluas pada orang-orang kulit hitam Amerika dan rakyat miskin di dunia. Maka itu, Iran melihat perangnya melawan imperialisme sebagai melengkapi revolusi Islamnya. Dalam perspektif ini Amerika Serikat harus dilawan sebagai lambang imperialisme dunia, sekalipun bukan satu-satunya. Fenomena ini dipantau jeli oleh pemerintahan Bush. AS menyadari bahwa

kondisi perlawanan Iran terhadap AS dapat berefek bola salju menjalar ke berbagai belahan dunia apabila tidak segera dihentikan.

Keempat, kemungkinan besar apabila eskalasi konflik antara AS dan Iran berlangsung lama dan makin memuncak, maka akan berimbas pada polarisasi kekuatan kanan-kiri di Iran yang akan menimbulkan bentrokan berdarah serta meningkat menjadi perang saudara. Adun kekuatan serupa itu bisa terjadi antara golongan Islam fundamentalis dengan golongan moderat. Bila itu terjadi, pihak negara luar yakni Rusia, karena kedekatan letak geografinya bisa memanfaatkannya untuk turun tangan.

Rupanya AS menyadari kemungkinan adanya campur tangan serupa itu, dan menyusun suatu rencana untuk menghadapinya (*contingency plans*). Karena itu bukan Januari ini AS melakukan sejumlah tindakan: mendaratkan dua kapal induk yang berpangkalan di Washington dan laut Pasifik yakni USS Dwight D. Eisenhower dan USS John C. Stennis yang memuat 16.000 tentara; penggelaran kekuatan personel pasukan gerak cepat yang dibantu oleh kapal-kapal gudang senjata dari Diego Garcia ke Pantai Iran untuk mendaratkan senjata-senjata berat dan suplai. AS mengkaji strateginya itu dengan asumsi adanya taruhan besar, yakni dengan menguasai Kawasan Teluk Parsi berarti AS bukan saja memperoleh sumber minyak yang murah dan berlimpah-limpah, tetapi juga dapat menundukkan negara-negara di dunia, termasuk Eropa Barat.

Secara demikian, AS berada pada posisi yang mempunyai peluang besar untuk menjatuhkan “kartu-kartu” lainnya. Pemaknaan teori bulan sabit geo-strategi, mungkin saja Pakistan dan India merupakan sasaran berikutnya karena sejak perang global melawan terorisme AS menjalin hubungan erat dengan kedua negara tersebut. Itu mencirikan semakin dekatnya pencapaian cita-cita merentangkan kawasan pengaruh AS dari Indochina, Afghanistan, Asia Selatan, dan Teluk Parsi. Itu juga berarti pukulan mematikan bagi pihak-pihak yang anti imperialisme AS, sebab dengan menguasai kawasan-kawasan itu pihak-pihak anti AS kehilangan sebagian besar kemampuan strategisnya baik secara politis, ekonomis maupun militer.

Grand Strategy AS

Kalkulasi strategi AS di atas sebenarnya tidak lepas dari strategi besar (*grand strategy*) AS dalam menjalin hubungannya dengan negara-negara Dunia Ketiga di era Paska Perang Dingin. Lebih satu decade terakhir ini AS menjalankan politik luar negeri terhadap negara-negara Dunia Ketiga dengan memprioritaskan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, meningkatkan jumlah negara yang berorientasi kapitalis paling tidak berwajah tidak anti imperialisme dalam arti luas, yang diharapkan mendukung politik luar negeri AS. Kedua, mengubah negara-negara Dunia Ketiga dari “generasi pertama” menjadi “generasi kedua” (dengan kekuasaan demokrasi dan hak asasi manusia) yang pro AS. Ketiga mengembangkan mereka lebih lanjut menjadi negara-negara “demokratis ala AS” secara penuh dan akhirnya mengikat negara-negara tersebut dengan blok AS. Keempat, kebijakan luar negeri AS didasari oleh ambisi untuk menjadi penguasa tunggal dunia dengan kemampuan global (*global capability*). Untuk mencapai ambisinya itu AS berupaya meningkatkan kawasan daerah pengaruh serta daerah kepentingannya, yang dapat menunjang kemampuan globalnya serta mengimbangi kekuatan anti-AS.

Penyimpulan keseluruhan fakta-fakta empiris di atas akan mengarahkan kita pada pemahaman bahwa kaitannya dengan sengketa nuklir Iran dewasa ini, pada awalnya kemungkinan besar Amerika Serikat, sebagai negara besar, tidak dapat membiarkan dirinya dihina dimuka dunia oleh Pemerintah Iran tanpa menghukumnya. Kini sangat kuatlah pendapat di Washington bahwa AS harus menggunakan ketidakpatuhan Iran terhadap Sanksi Dewan Keamanan PBB untuk menegakkan kembali pengaruhnya di kawasan Teluk Parsi yang sudah lama lepas sejak jatuhnya Shah Pahlevi. Usaha AS untuk memperkuat kehadiran militernya di perairan dekat Iran yang mulai digalang pekan ini kiranya dapat dilihat dalam hubungan itu.

Secara demikian penggelaran kekuatan militer AS di kawasan Teluk Parsi kali ini kiranya akan mempunyai efek panjang. Bukan saja bisa berakhir dengan pergantian pemerintah di Iran tetapi juga dengan perubahan perimbangan kekuatan negara-negara besar sebab kawasan ini mempunyai arti strategis yang penting berkat letak geografisnya dan kekayaan minyaknya. Perkembangan itu perlu kita ikuti dengan seksama.***

Penulis adalah Staf Pengajar Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.